

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Sindy Hartati* Edi Sutanto** Imas Fatimah***

*,**,*** Universitas La Tansa Mashiro, Rangkasbitung, Indonesia

Article Info

Keywords:

Implementation of Government Accounting Standards, Quality of Local Government Apparatus and Quality of Financial Reports.

Abstract

This study aims to determine the effect of applying government accounting standards and the quality of local government officials to the quality of financial reports. The independent variables in this research are the application of government accounting standards and the quality of local government apparatus. The dependent variable in this study is the quality of financial statements. The method used in this research is descriptive analysis with a quantitative approach. The population in this study were 56 respondents. The type of data used in this study is primary data. The sampling technique used in this research is purposive sampling, which is a sampling technique with certain considerations. Certain criteria are used as a measure in sampling: employees who carry out functions in budgeting and accounting and are directly involved in an implementation of LKPD Writing in Pandeglang Regency. The research sample is 40 respondents. The data analysis techniques used in this study are Validity Test, Reliability Test, Data Prerequisite Test, Normality Test, Heteroscedasticity Test, Multicollinearity Test, Autocorrelation Test, Multiple Linear Regression Test, Partial Test (t test), and Simultaneous Effect Test (F test). The results of this study indicate that the application of government accounting standards and the quality of local government apparatus simultaneously have a significant effect on the quality of financial reports at the BKAD Office of Pandeglang Regency. Partially, the application of government accounting standards and the quality of local government officials do not significantly affect the quality of financial reports at the Pandeglang Regency BKAD Office.

Corresponding Author:

sindyhar18@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah dan kualitas aparatur pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan. Variabel independen dalam penelitian ini adalah penerapan standar akuntansi pemerintah dan kualitas aparatur pemerintah daerah Untuk variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 56 responden. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Kriteria tertentu yang menjadi ukuran dalam pengambilan sampel: pegawai yang menjalankan fungsi dalam penganggaran dan akuntansi serta langsung terlibat dalam suatu implementasi Penulisan LKPD Kabupaten Pandeglang. Sampel penelitian yaitu berjumlah 40 responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Prasyarat Data, Uji Normalitas, Uji Heterokedastisitas, Uji Multikolinearitas, Uji Autokorelasi, Uji Regresi Linier Berganda, Uji Parsial (uji t), dan Uji Pengaruh Simultan (uji F). Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan standar akuntansi pemerintah dan kualitas aparatur pemerintah daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor BKAD Kabupaten Pandeglang. Secara parsial, penerapan standar akuntansi pemerintah dan kualitas aparatur pemerintah daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor BKAD Kabupaten Pandeglang.

Pendahuluan

Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional. Perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang yaitu Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang sekarang diubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan berpedoman pada SAP, maka diharapkan laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara relevan dan handal sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan. Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan, yakni laporan keuangan yang mempunyai karakteristik relevan, Andal, Dapat dibandingkan dan Dapat dipahami. Sehingga bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Huang et al., (1999) dalam Sukmaningrum (2012:41) menyatakan bahwa informasi akan bermanfaat apabila suatu informasi dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dikatakan baik apabila disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan. Standar akuntansi pemerintahan merupakan prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Penerapan standar akuntansi pemerintahan yang benar dan pemahaman yang baik terhadap akuntansi keuangan daerah oleh pengelola keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tentunya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang memiliki karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat di pahami (Novia et.al, 2015).

Relevan yaitu memiliki manfaat umpan balik (feedback value), memiliki manfaat prediktif (predictive value), tepat waktu, dan lengkap. Andal yaitu bebas dari pengertian menyesatkan, penyajiannya jujur, dapat diverifikasi dan netralisasi. Kemudian dapat dibandingkan yaitu laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat dijadikan sebagai penilaian kinerja, dan dapat dipahami yaitu laporan keuangan yang disajikan dapat dipahami dengan mudah oleh pengguna informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Pemerintah pusat selalu berupaya menyalurkan dana ke daerah, berupa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Daerah Otonomi Khusus, Dana bagi hasil Pajak atau dana transfer lainnya yang pelaksanaannya telah tepat waktu dengan harapan pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan public secepat mungkin. Hal itu tak lain bertujuan untuk mendorong perputaran uang dan perekonomian dimasyarakat. Namun yang terjadi dilapangan, pada Catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), hingga akhir Oktober 2019 menyatakan bahwa total saldo pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau dana yang menganggur di pemerintah di beberapa daerah terpantau membengkak. Dana tersebut mencapai sebesar Rp 261 triliun. Angka tersebut lebih besar dibandingkan dengan periode tahun lalu yaitu Rp 225 triliun. Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Kemenkeu, fenomena tersebut merupakan indikasi bahwa masih banyak daerah tidak membelanjakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) secara produktif. Untuk mengoptimalisasi bagian dari TKDD ini, pemerintah akan memberlakukan sanksi bagi daerah yang dianggap bermasalah.

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu cermin tertib tidaknya pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang mencakup tertib administrasi dan taat asas, namun berdasarkan kondisi yang terjadi terdapat fenomena, yaitu bahwa masih banyak daerah yang belum optimal dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berarti belum dapat menunjukkan kualitas laporan keuangan yang baik sebagai bentuk pertanggungjawaban, sebagaimana hasil pemeriksaan pada semester I tahun 2020, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan opini WTP atas 485 (90%) LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 50 (9%) LKPD, dan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 6 (1%) LKPD. (unduhan siaran pers BPK-RI tanggal 10 November 2020) Dengan demikian, masih perlunya usaha pemerintah untuk terus mengoptimalkan kualitas laporan keuangan daerahnya dengan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah. Penerapan SAP diwajibkan setiap entitas pelaporan, yang dalam hal ini termasuk pemerintah daerah untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antara generasi dan evaluasi kinerja (Daniel Kartika Adhi dan Yohanes Suhardjo, 2013).

Supaya laporan keuangan pemerintahan daerah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) maka diharapkan laporan keuangan tersebut harus berkualitas. WTP adalah pendapat yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sehingga laporan keuangan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (Nova Sari 2015). Ada beberapa yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu Pemahaman Akuntansi, Menurut Yuliani (2010) rendahnya kualitas laporan keuangan dapat disebabkan oleh pemahaman akuntansi dari penyusun laporan keuangan itu sendiri, belum diterapkannya secara optimal sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan atau lemahnya peran internal audit. Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi adalah mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada

prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kualitas aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan dalam hal ini antara lain pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan diarahkan untuk meningkatkan kualitas yang dibutuhkan. Sedikitnya pegawai yang berlatar belakang pendidikan bidang akuntansi menjadikan kurangnya penguasaan aparatur Organisasi Perangkat Daerah dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan benar (Kholis, 2013).

Dalam menyusun laporan keuangan pemerintah yang berkualitas tidak terlepas dari kualitas sumber daya aparatur pemerintah dalam menyusun laporan keuangan. Dengan demikian agar laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, maka sebagai aparatur pemerintah harus memiliki kemampuan dalam menyusun laporan keuangan dan mengetahui apa saja komponen-komponen yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah.

Dalam mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas pada entitas pemerintah maka harus didasari pula dengan sumber daya aparatur pemerintah yang berkualitas. Kualitas aparatur pemerintah menjadi hal yang sangat krusial, sebab di tangan aparatur pemerintah inilah yang akan menghasilkan bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah terhadap publik. Pada kenyataannya, sudah menjadi permasalahan umum bahwa di instansi pemerintah daerah penataan personil seringkali dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan baik secara kuantitas maupun kualitas. Berdasarkan aspek kualitas, penataan personil yang dilakukan seringkali tidak mengikuti prinsip “The Right Man On The Right Place”. Hal ini sangat berkaitan dengan pengembangan organisasi yang hanya mempertimbangkan kewenangan sementara kualitas sumber daya aparatur yang ada belum memenuhi kompetensi yang seharusnya dipenuhi (Aruan, 2003).

Beberapa penelitian tentang Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sudah banyak dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya seperti, (Diani, 2014) yang menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah (LKPD), (Adhi, daniel kartika & suhardjo, 2013) dengan hasil penelitian variabel Kualitas Aparatur Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Menurut pendapat Deddi Nordiawan (2006) dalam Irvan Permana (2011) menyatakan bahwa adanya pengaruh antara Standar Akuntansi Pemerintahan pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu, “SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan departemen- departemennya maupun di pemerintahan daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintahan pusat dan daerah.” Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Irvan Permana (2011) tentang pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan implikasinya pada akuntabilitas, mendapatkan hasil, yaitu terdapat hubungan antara Standar Akuntansi Pemerintahan signifikan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan implikasinya terhadap akuntabilitas.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan secara efektif, akan mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Junnaini (2012) yang membuktikan bahwa penerapan SAP berpengaruh

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Sihombing (2011) dan Arif Ardi Kusumah (2012) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan SAP berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Beberapa penelitian menemukan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Seperti penelitian Sako (2018) hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAP berpengaruh positif terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fikri, dkk (2016) dalam penelitiannya menemukan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Penelitian dari Solikin & Kustiawan, (2012) menyatakan bahwa pemberdayaan aparatur pemerintah merupakan faktor penting dalam mewujudkan kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian dari Oktarina, dkk (2016) yang menyatakan bahwa kualitas aparatatur pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian lainnya dari Rahmawaty, (2015) menyatakan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud, yang artinya adalah aparatur yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan akan lebih berpotensi melakukan pencegahan kecurangan keuangan supaya tidak merugikan masyarakat. Selanjutnya penelitian (Wiraputra, 2014) menunjukkan pengaruh positif pemahaman SAP dan Latar belakang pendidikan terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. (Nordiawan dan Hertianti, 2010) menyatakan bahwa bahwa penerapan SAP berdampak terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah.

Hasil Penelitian Kiranayanti & Erawati, (2016) menyatakan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan pemahaman Akuntansi berbasis Akrua mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berbeda dengan dengan (Inapty, dan Martiningsih, 2016) yang menyatakan bahwa penerapan SAP, kompetensi Aparatur, peran audit internal dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Penelitian (Sugiarto, dan Alfian, 2014) serta (Kusuma, 2013) menduga bahwa variabel teknologi informasi mempengaruhi tingkat penerapan akuntansi akrual pada pemerintah. Hasil penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya adalah penelitian Prapto, (2010) yang menemukan bukti empiris bahwa Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, kualitas aparatur pemerintah daerah, terhadap kualitas laporan keuangan masih terdapat “Research gap” yang berupa perbedaan hasil penelitian. Oleh karena itu penelitian ini akan mencoba kembali menganalisis pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, kualitas aparatur pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini merupakan penelitian yang melanjutkan penelitian- penelitian sebelumnya. Penelitian sejenis yang dilakukan umumnya dilakukan dengan kombinasi

variabel yang berbeda. Penelitian ini menggunakan sampel Pemerintahan di Kabupaten Pandeglang.

Metode Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner yang diberikan kepada semua responden secara langsung. Penyebaran kuesioner ini dilakukan pada seluruh pegawai yang menjadi sample di kantor BKAD Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kuantitatif. Sugiyono (2011: 7) menyatakan bahwa “Metode penelitian kuantitatif berdasarkan pada filsafat positivisme dalam metode penelitiannya, hal ini digunakan pada penelitian populasi atau sampel tertentu”. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, yaitu gabungan antara metode kuantitatif dan deskriptif. Metode deskriptif adalah dengan melakukan deskripsi/penjelasan dalam bentuk tabel maupun grafik atas kondisi obyek penelitian maupun hasil penelitian. Metode kuantitatif adalah dengan menggunakan alat analisis kuantitatif dan dalam penelitian ini akan menggunakan regresi Linear Berganda. Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang meliputi objek dan subjek yang didalamnya memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang akan ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari lebih lanjut dan kemudian untuk di tarik kesimpulannya dari hal tersebut (Sugiyono 2018:136). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada bagian keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Pandeglang, sebagai instansi yang berwenang dalam pengelolaan keuangan dan sekaligus sebagai penyusun laporan keuangan pemerintah kabupaten Pandeglang. Jumlah populasi yang digunakan sebanyak 75 pegawai.

Hasil dan Pembahasan

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dari hasil pengujian secara parsial, variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah menunjukkan hasil bahwa nilai thitung > ttabel yakni $1,932 < 2,02439$ dengan tingkat signifikansi $0,061 > 0,05$ sehingga dapat dinyatakan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Penerapan SAP di Kantor BKAD Kabupaten Pandeglang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan karena dengan di Kantor BKAD Kabupaten Pandeglang penerapan SAP belum sepenuhnya diterapkan dalam menyusun laporan Keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Ali Fikri (2016) yang menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Inapty (2016) dan Azzindani (2019) menjelaskan bahwa pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah pada laporan keuangan tidak mempunyai pengaruh pada kualitas laporan keuangan dengan hasil penerapan standar akuntansi pemerintah tidak signifikan pada kualitas laporan keuangan. Penerapan standar akuntansi pemerintahan masih belum maksimal dilakukan. Hal ini dikarenakan kompetensi aparatur atau kualitas aparatur pemerintah daerah yang minimal. Temuan ini juga diperkuat berdasarkan hasil survey di lokasi yang memberikan gambaran banyaknya pengelola keuangan yang bukan berlatar belakang pendidikan akuntansi, pemahaman tentang standar akuntansi pemerintahan yang baru masih belum mapan dan peran pembinaan melalui audit internal yang kurang (belum independen). Sampel merupakan bagian yang ada didalam populasi yang terwakili dan akan dijadikan sebagai alat penelitian atau beberapa jumlah karakteristik dari populasi yang

terwakili (Wiyono, 2011). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Kriteria tertentu yang menjadi ukuran dalam pengambilan sampel: pegawai yang menjalankan fungsi dalam penganggaran dan akuntansi serta langsung terlibat dalam suatu implementasi Penulisan LKPD Kabupaten Pandeglang. Sampel penelitian yaitu berjumlah 40 responden.

Kualitas Aparatur Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dari hasil pengujian secara parsial, variabel Kualitas Aparatur Pemerintah menunjukkan hasil bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yakni sebesar $1,465 < 2,02439$ dengan tingkat signifikansi $0,151 > 0,05$ sehingga dapat dinyatakan bahwa Kualitas Aparatur Pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriasari dan Nahartyo (2008) dalam Sukmaningrum (2012), yang hasilnya menunjukkan bahwa kualitas aparatur pemerintah daerah, tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan secara signifikan. Dan penelitian yang dilakukan oleh Ponama (2014) bahwa kompetensi SDM atau kualitas aparatur pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Senada dengan itu Siwambudi, dkk (2017) menemukan kualitas aparatur pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas aparatur pemerintah daerah tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah Kabupaten Pandeglang. Berdasarkan informasi yang didapatkan, hasil tidak signifikan ini disebabkan karena kondisi kompetensi aparatur pemerintah daerah yang ada di BKAD Kabupaten Pandeglang di bagian akuntansi atau tata usaha keuangan yang belum mendukung, masih banyak karyawan dibidang keuangan atau tata usaha keuangan di BKAD Kabupaten Pandeglang yang tidak memiliki latar belakang akuntansi. Tidak semua pegawai yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi paham dan bisa menyelesaikan permasalahan dalam laporan keuangan daerah. Peningkatan jenjang pendidikan pegawai kurang memperhatikan status dan kualitas lembaga pendidikan maupun jurusan yang diambil, sehingga pemanfaatan bagi pegawai maupun organisasi kurang optimal. Penempatan pegawai pada pemerintah Kabupaten Klungkung masih belum disesuaikan dengan keahlian individual masing-masing, khususnya pada bagian akuntansi masih relatif sedikit pegawai yang memiliki pendidikan bidang akuntansi. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dari hasil pengujian secara simultan variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah menunjukkan hasil bahwa nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yakni sebesar $4,893 > 3,24$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,013 < 0,05$. Sehingga dapat dinyatakan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Daniel Kartika Adhi dan Yohanes Suhardjo (2013) menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah dan kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Dan penelitian yang dilakukan oleh Mia Oktaria dkk (2016) menunjukkan bahwa

penerapan standar akuntansi pemerintah dan kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dapat terjadi karena ketika aparatur pemerintah daerah berkompeten maka akan memudahkan para pegawai dalam penerapan standar akuntansi pemerintah sehingga akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dari penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan – kesimpulan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Dapat dilihat dari nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yakni $1,932 < 2,02439$ dengan tingkat signifikansi $0,061 > 0,05$. Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Dapat dilihat dari nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yakni sebesar $1,465 < 2,02439$ dengan tingkat signifikansi $0,151 > 0,05$. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Dapat dilihat dari nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yakni sebesar $4,893 > 3,24$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,013 < 0,05$.

Daftar Pustaka

- Adhi, D. K., & Suhardjo, Y. (2013). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tual). *Jurnal stie semarang (edisi elektronik)*, 5(3), 93-111.
- Anggota IKAPI (2011) “*Standar Akuntansi Pemerintah*”. Bandung : Fokus Media Aruan N, (2003). “*Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Studi Empiris di Jawa Timur*”.
- Anwar, H., Siswadi, U., & Mufidah, F. (2023). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, dana bagi hasil, dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada pemerintah di provinsi banten. *The Asia Pacific Journal of Management Studies*, 10(2).
- Bastian, Indra. 2010. “*Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*”. Jakarta: Erlangga.
- Bastian, Indra 2010. “*Sistem Informasi Sektor Publik*”. Jakarta : Badan Penerbit Salemba Empat
- Djalil, Rizal. 2014. *Akuntabilitas Keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformasi*. Jakarta : RMBOOKS
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 25 Up Date OLS Regresi*. Edisi 9. Semarang: Universitas Diponogoro.
- Halim, A., & Kusufi, M.S (2017). *Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hidayat, D., Sari, M., & Firdaus, A. R. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. *Valuta*, 7(1), 1-13.
- Fauziah Ifat (2018) *Standar Akuntansi Pemerintah*. Pamulang : Bumi Pamulangs
- Kesuma, D. P., Anwar, C., & Darmansyah, D. (2018). Pengaruh Good Governance, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

- Pemerintah Pada Satuan Kerja Kementerian Pariwisata. *E-Journal Widya Ekonomika*, 1(2), 141-146.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah (2012) *Standar Akuntansi Pemerintah*. Jakarta Selatan : Salemba Empat
- Latifah, A. (2017). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada SKPD Kabupaten Bantul). *Prodi Akuntansi*.
- Lubis, Ade Fatma. 2012. *Metode Penelitian Akuntansi dengan Format Penulisan Tesis*. Medan : USU Press
- Mahmudi. 2012. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Edisi Kedua. UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Nugroho, H. R. (2016). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pengawasan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2014)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Nufus, F., & Siswadi, U. (2023). Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, sistem pelaporan dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelola dana desa. *The Asia Pacific Journal of Management Studies*, 10(1).
- Oktarina, M., Raharjo, K., & Andini, R. (2016). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, kualitas aparatur pemerintah daerah dan good governance terhadap kualitas laporan keuangan Di Kota Semarang (Studi Kasus Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2014). *Journal of Accounting*, 2(2).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Priyanto, Dwi, 2012. *Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20*. Yogyakarta : Andi
- Safitri, R. N., Mahsuni, A. W., & Junaidi, J. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bima, NTB). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 9(02).
- Sako, U., & Lantowa, F. D. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo. *Journal of Accounting Science*, 2(1), 43- 54.
- Sari, N. P. Y. M. M., Adiputra, I. M. P., SE, S., & Edy Sujana, S. E. (2014). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas-Dinas di Pemerintah Kabupaten Jembrana). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 2(1).
- Siswadi, U. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Desa (Pades), Dana Desa (Dd), Dan Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Belanja Desa Pada 10 Kecamatan Di Kabupaten Lebak. *The Asia Pacific Journal of Management Studies*, 10(3).
- Sugiyono (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.

- Sugiyono. 2011. Statistika Untuk Penelitian. Edisi-Revisi, Cetakan 12. Bandung. Penerbit CV. Alfabeta.
- Triharta, A. B (2013) Sistem Akuntansi Pemerintahan Basis AkruaI dengan Entri Berpasangan. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Wibowo, W. L., Suharno, S., & Widarno, B. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(1), 52-61.
- .